



## **Meraih untung dari pandemi: Pemerintah negara bagian di India berupaya menghilangkan hak-hak serikat dan perlindungan terhadap pekerja**

13.05.2020

Di India, serangan terhadap hak-hak dasar di tempat kerja semakin banyak dengan dalih mempromosikan pemulihan ekonomi sebagai dampak dari darurat COVID-19. Pemerintah negara bagian Uttar Pradesh (negara bagian dengan jumlah penduduk terpadat di India), Madhya Pradesh, Gujarat dan Maharashtra membatalkan atau menunda hukum yang mengizinkan untuk:

- Penambahan jam kerja dari 8 jam ke standar 12 jam, tanpa upah lembur;
- Penangguhan UU upah minimum;
- Penghapusan pembatasan PHK pekerja tetap dan mengganti mereka dengan pekerja kontrak, pengangkatan dan pemecatan sesuai dengan “kenyamanan” pengusaha;
- Menunda kontribusi pengusaha ke skema wajib jaminan sosial dan pensiun;
- Membebaskan pabrik baru dari inspeksi tenaga kerja pemerintah

Pemerintah Uttar Pradesh telah mengumumkan rencana penangguhan 30 UU dan peraturan selama 3 tahun, termasuk UU yang mengatur penyelesaian perselisihan industrial, kesehatan dan keamanan tempat kerja, perawatan fasilitas termasuk air dan sanitasi, kantin dan tempat penitipan bayi, hak-hak serikat pekerja dan perihal mempekerjakan pekerja kontrak.

Madhya Pradesh akan mengizinkan pengusaha mempekerjakan pekerja kontrak untuk jangka waktu yang lebih lama, memotong pengakuan serikat pekerja dan perundingan bersama di industri-industri utama dan membebaskan perusahaan baru dari mekanisme perundingan bersama dan penyelesaian sengketa.

Penghancuran serikat pekerja dan hak-hak pekerja yang dimenangkan dengan susah payah dan perlindungan pekerja yang ditetapkan dalam Konvensi ILO sedang berlangsung di tengah serangan pemerintah nasional atas dasar sekularisasi demokrasi India. IUF menegaskan solidaritas penuh untuk anggota kami di India dan gerakan buruh yang lebih luas yang berjuang untuk membela hak-hak dasar melawan serangan otoriter, dan kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mendukung mereka.